



Kontribusi Lingkungan Sosial terhadap Keputusan Perceraian di Jawa Barat: Analisis Regresi Logistik pada Data SUSENAS 2022

Asti Engla Julpani¹, Endrizal Ridwan²

^{1,2}Universitas Andalas

englaarti@gmail.com

Abstract

The high divorce rate in West Java Province underscores the need for an in-depth examination of environmental factors influencing individuals' decisions to divorce. This study aims to analyze the impact of social environments with high divorce rates on individual divorce decisions, while accounting for control variables such as working hours, education level, and age at marriage. Using data from the 2022 National Socio-Economic Survey and a binary logistic regression approach, the study finds that individuals living in areas with high divorce rates are 1.645 times more likely to get divorced $p < 0.001$. Early marriage also shows a significant effect $OR = 1.098$; $p < 0.05$. In contrast, working hours and education are not statistically significant. These findings highlight the urgency of community-based interventions and social policies that are sensitive to local norms.

Keywords: Divorce, Social Environment, Early Marriage, Logistic Regression, West Java.

Abstrak

Tingginya angka perceraian di Provinsi Jawa Barat mendorong perlunya kajian mendalam terhadap faktor lingkungan yang memengaruhi keputusan individu untuk bercerai. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh lingkungan sosial dengan tingkat perceraian tinggi terhadap keputusan perceraian, dengan mempertimbangkan variabel kontrol seperti jam kerja, tingkat pendidikan, dan usia saat menikah. Menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2022 dan pendekatan regresi logistik biner, ditemukan bahwa individu yang tinggal di wilayah dengan angka perceraian tinggi memiliki kemungkinan 1,645 kali lebih besar untuk bercerai $p < 0,001$. Pernikahan dini juga berpengaruh signifikan $OR = 1,098$; $p < 0,05$. Sebaliknya, jam kerja dan pendidikan tidak signifikan. Temuan ini menekankan perlunya intervensi berbasis komunitas dan kebijakan sosial yang peka terhadap norma lokal.

Kata kunci: Perceraian, Lingkungan Sosial, Pernikahan Dini, Regresi Logistik, Jawa Barat.

INFEB is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.



1. Pendahuluan

Angka perceraian di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan dinamika sosial yang semakin kompleks di tengah perubahan nilai, gaya hidup, dan tekanan ekonomi. Salah satu wilayah yang menonjol dalam fenomena ini adalah Provinsi Jawa Barat, yang tercatat sebagai daerah dengan jumlah kasus perceraian tertinggi secara nasional pada tahun 2022. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 113.643 kasus perceraian di Jawa Barat sepanjang tahun tersebut [1]. Angka ini merepresentasikan tidak hanya volume populasi yang besar, tetapi juga mencerminkan kondisi sosial-ekonomi dan budaya yang mungkin berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian di wilayah ini.

Peningkatan angka perceraian bukan sekadar persoalan hukum atau administrasi keluarga, melainkan berdampak luas terhadap struktur sosial masyarakat. Perceraian menyebabkan terpecahnya unit keluarga inti yang menjadi fondasi dasar dalam membangun kehidupan sosial, emosional, dan ekonomi individu. Dampak tersebut dapat terlihat dalam berbagai aspek [2]. Secara sosial, perceraian dapat memicu disintegrasi

sosial di tingkat komunitas dan berpotensi menurunkan kualitas hubungan antar anggota keluarga. Secara psikologis, anak-anak dari keluarga bercerai berisiko mengalami gangguan emosional, seperti kecemasan, depresi, hingga penurunan prestasi akademik, karena hilangnya stabilitas dan dukungan emosional dari keluarga utuh [3].

Dari sisi ekonomi, perceraian sering kali menyebabkan menurunnya pendapatan rumah tangga karena perpisahan sumber daya ekonomi antara pasangan. Hal ini dapat memperburuk risiko kemiskinan, terutama bagi pihak yang tidak memiliki pendapatan mandiri, yang dalam banyak kasus adalah perempuan. Kondisi ini juga menciptakan beban tambahan bagi negara, baik dalam bentuk peningkatan kebutuhan bantuan sosial maupun beban fiskal untuk menangani dampak jangka panjang seperti intervensi anak bermasalah atau program rehabilitasi sosial [4].

Melihat kompleksitas dampak yang ditimbulkan, penting untuk memahami faktor-faktor yang mendorong seseorang mengambil keputusan untuk bercerai. Tidak hanya faktor internal salah satu ketidakcocokan pribadi atau konflik rumah tangga, tetapi juga faktor eksternal seperti tekanan ekonomi, norma sosial yang permisif, dan pengaruh lingkungan

sosial yang menormalisasi perceraian [5]. Pemahaman yang komprehensif terhadap faktor-faktor tersebut menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan sosial yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dalam menekan angka perceraian dan memitigasi dampaknya bagi masyarakat [6].

Dalam kajian ekonomi keluarga, perceraian dipandang sebagai keputusan rasional yang diambil ketika utilitas atau kesejahteraan rumah tangga menurun secara signifikan [7]. Artinya, ketika konflik dalam rumah tangga menyebabkan ketidakpuasan yang berkepanjangan, individu dapat memutuskan untuk bercerai sebagai upaya memaksimalkan kesejahteraan pribadi. Pandangan ini menekankan bahwa perceraian bukan semata-mata kegagalan moral atau emosional, melainkan bagian dari pilihan ekonomi yang rasional dalam situasi tertentu.

Namun demikian, keputusan untuk bercerai tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi internal rumah tangga, tetapi juga oleh norma sosial yang berlaku di lingkungan sekitar [8]. Norma tersebut dapat membentuk preferensi individu dan menurunkan atau meningkatkan hambatan sosial dan psikologis terhadap perceraian. Dalam masyarakat dengan tingkat perceraian tinggi, perceraian dapat dianggap lebih wajar atau diterima, sehingga memengaruhi kecenderungan individu untuk mengambil keputusan serupa [9].

Norma sosial memiliki peran penting dalam membentuk preferensi, persepsi, dan pilihan individu terhadap pernikahan dan perceraian [10]. Dalam konteks ini, lingkungan yang memiliki angka perceraian tinggi cenderung menciptakan persepsi bahwa perceraian adalah pilihan yang lumrah atau wajar. Normalisasi tersebut dapat menurunkan hambatan psikologis dan sosial individu untuk bercerai, karena tekanan atau stigma sosial yang biasanya melekat pada perceraian menjadi lebih lemah. Akibatnya, individu dalam lingkungan seperti ini lebih terbuka terhadap perceraian sebagai solusi atas konflik rumah tangga [11].

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh lingkungan sosial dengan tingkat perceraian tinggi terhadap keputusan individu untuk bercerai di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan variabel kontrol yang berpotensi memengaruhi keputusan perceraian, yaitu jam kerja, tingkat pendidikan, dan usia saat pernikahan pertama (pernikahan dini) [12].

Penelitian ini bertumpu pada pendekatan ekonomi keluarga, yang memandang perceraian sebagai suatu keputusan rasional yang diambil ketika utilitas atau kesejahteraan rumah tangga menurun secara signifikan [13]. Dalam kerangka ini, individu atau pasangan suami istri menimbang secara logis antara manfaat dan biaya dari mempertahankan pernikahan dibandingkan dengan memilih untuk bercerai [14]. Ketika manfaat yang diperoleh dari perceraian, seperti kebebasan emosional, stabilitas psikologis, atau peningkatan kesejahteraan individu, dianggap lebih besar dibandingkan dengan

biaya yang ditimbulkan, maka perceraian dipilih sebagai solusi rasional atas ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga.

Dalam konteks lingkungan sosial, teori New Institutional Economics [15] dan Social Contagion Theory [16] memberikan penjelasan tambahan mengenai bagaimana norma dan perilaku sosial termasuk keputusan untuk bercerai dapat menyebar melalui interaksi dalam komunitas. Norma yang permisif terhadap perceraian di suatu wilayah dapat menciptakan atmosfer sosial yang lebih menerima terhadap perceraian, sehingga menurunkan hambatan sosial maupun psikologis individu untuk mengakhiri pernikahan. Dengan kata lain, lingkungan sosial berperan penting dalam membentuk preferensi dan pilihan individu, termasuk dalam hal keberlanjutan kehidupan pernikahan [17].

Lingkungan sosial yang secara terbuka menampilkan atau mentoleransi kasus-kasus perceraian dapat membentuk persepsi kolektif bahwa perceraian merupakan solusi yang wajar dan umum atas berbagai konflik rumah tangga. Ketika individu melihat bahwa perceraian sering terjadi di sekelilingnya tanpa stigma sosial yang kuat, maka ambang psikologis dan sosial untuk mengambil keputusan yang sama menjadi lebih rendah. Dalam konteks ini, norma sosial berperan penting dalam membentuk sikap dan perilaku individu, termasuk dalam hal menyelesaikan konflik pernikahan. Semakin sering seseorang menyaksikan perceraian di komunitasnya, semakin besar kemungkinan ia memandang perceraian sebagai jalan keluar yang dapat diterima secara sosial [18].

Lebih jauh lagi, dalam perspektif pembangunan sosial dan ekonomi, perceraian tidak hanya berdampak pada aspek relasional, tetapi juga menimbulkan konsekuensi ekonomi yang signifikan bagi rumah tangga. Salah satu dampak utamanya adalah penurunan pendapatan, terutama jika salah satu pihak tidak memiliki sumber penghasilan mandiri. Hal ini memperbesar risiko jatuhnya rumah tangga ke dalam kemiskinan, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang sering kali menjadi pihak yang paling terdampak. Selain itu, perceraian juga dapat mengganggu keberlanjutan pendidikan anak karena tekanan ekonomi dan psikologis yang dihadapi oleh keluarga pasca-perceraian. Dengan demikian, perceraian bukan hanya persoalan pribadi, melainkan isu sosial yang berdampak luas pada kualitas hidup dan pembangunan manusia secara keseluruhan [19].

Beberapa variabel kontrol salah satu pendidikan, jam kerja, dan usia saat menikah juga terbukti memengaruhi keputusan perceraian. Individu dengan tingkat pendidikan rendah cenderung memiliki keterbatasan dalam keterampilan komunikasi dan pemecahan konflik, yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya perceraian. Selain itu, pernikahan dini yang umumnya dilakukan sebelum usia 19 tahun juga berkaitan dengan tingkat perceraian yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena pasangan yang menikah muda sering kali belum mencapai kematangan

emosional dan ekonomi yang cukup untuk menjalani kehidupan rumah tangga secara stabil [20].

Di sisi lain, jam kerja yang panjang (>40 jam per minggu) dapat memperburuk konflik rumah tangga. Waktu kerja yang berlebihan menyebabkan berkurangnya waktu berkualitas antara pasangan, yang pada akhirnya dapat mengganggu komunikasi dan memperlemah ikatan emosional dalam rumah tangga. Tekanan pekerjaan yang tinggi juga bisa menimbulkan stres tambahan yang terbawa ke dalam kehidupan rumah tangga, sehingga meningkatkan risiko terjadinya perceraian [20].

Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, menganalisis pengaruh lingkungan sosial dengan tingkat perceraian yang tinggi terhadap keputusan individu untuk bercerai di Provinsi Jawa Barat. Kedua, menilai apakah pengaruh lingkungan sosial tersebut tetap signifikan setelah mempertimbangkan sejumlah variabel kontrol, seperti jam kerja, tingkat pendidikan, dan usia pernikahan pertama atau pernikahan dini. Ketiga, mengukur sejauh mana kontribusi faktor lingkungan sosial dibandingkan dengan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya dalam menjelaskan fenomena tingginya angka perceraian di Jawa Barat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Populasi dalam penelitian mencakup seluruh individu yang pernah menikah dan berdomisili di Provinsi Jawa Barat. Teknik penarikan sampel dilakukan secara purposive sampling, dengan kriteria inklusi yaitu responden yang memiliki status pernah menikah, baik yang saat ini masih berstatus menikah maupun yang telah bercerai. Pendekatan ini dipilih agar analisis dapat secara spesifik menjangkau kelompok sasaran yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi keputusan perceraian di wilayah tersebut.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah status perceraian, yang dikodekan secara biner dengan nilai 1 untuk individu yang berstatus cerai hidup dan 0 untuk status lainnya. Variabel utama atau independen adalah lingkungan dengan tingkat perceraian tinggi, yang ditentukan berdasarkan jumlah kasus perceraian minimal 20 kasus per kabupaten/kota. Cutoff ini ditetapkan berdasarkan distribusi frekuensi kasus perceraian di seluruh wilayah Jawa Barat.

Selain itu, penelitian ini juga memasukkan beberapa variabel kontrol untuk memastikan ketepatan analisis. Variabel jam kerja dikategorikan sebagai panjang apabila responden bekerja lebih dari 40 jam per minggu. Tingkat pendidikan responden diklasifikasikan sebagai rendah apabila hanya menempuh pendidikan hingga Sekolah Dasar atau lebih rendah. Sementara itu, usia pernikahan pertama dianggap sebagai pernikahan dini jika terjadi sebelum usia 19 tahun. Penggunaan variabel-variabel kontrol ini bertujuan untuk

menangkap pengaruh potensial dari kondisi sosial-ekonomi individu terhadap keputusan perceraian.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik biner, yang bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap probabilitas individu mengalami perceraian. Model ini sesuai digunakan karena variabel dependen berbentuk dikotomik (cerai hidup = 1; lainnya = 0). Evaluasi kelayakan model dilakukan melalui goodness-of-fit test menggunakan Hosmer-Lemeshow Test, yang menguji apakah model sesuai dengan data secara empiris. Selain itu, interpretasi hasil regresi dilakukan dengan mengestimasi nilai Odds Ratio (OR) dari masing-masing variabel, untuk melihat seberapa besar pengaruh relatif dari setiap faktor terhadap kemungkinan perceraian.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah lingkungan sosial dengan tingkat perceraian yang tinggi berpengaruh terhadap keputusan individu untuk bercerai di Provinsi Jawa Barat. Secara spesifik, hipotesis nol (H_0) menyatakan bahwa lingkungan sosial dengan tingkat perceraian tinggi tidak berkontribusi terhadap keputusan individu untuk bercerai. Sebaliknya, hipotesis alternatif (H_1) menyatakan bahwa lingkungan sosial dengan tingkat perceraian tinggi berkontribusi terhadap keputusan individu untuk bercerai. Pengujian hipotesis ini dilakukan menggunakan analisis regresi logistik biner dengan interpretasi berdasarkan nilai Odds Ratio untuk mengetahui kekuatan dan arah pengaruh yang ditimbulkan.

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menganalisis data sebanyak 5.943 observasi yang berasal dari individu-individu yang pernah menikah dan berdomisili di Provinsi Jawa Barat, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2022. Dari keseluruhan sampel, tercatat bahwa 3,76% responden memiliki status cerai hidup, yang menunjukkan bahwa meskipun persentasenya relatif kecil, perceraian tetap merupakan fenomena yang signifikan dalam dinamika rumah tangga di wilayah ini. Selanjutnya, berdasarkan distribusi lingkungan tempat tinggal, ditemukan bahwa sekitar 49,8% dari responden tinggal di kabupaten/kota yang tergolong sebagai wilayah dengan tingkat perceraian tinggi, yaitu daerah yang memiliki sedikitnya 20 kasus perceraian dalam satu tahun. Distribusi ini menjadi penting karena memungkinkan analisis perbandingan antara individu yang tinggal di lingkungan dengan eksposur perceraian tinggi dan mereka yang tinggal di lingkungan dengan tingkat perceraian rendah, untuk menilai sejauh mana konteks sosial memengaruhi keputusan individu untuk bercerai.

Model regresi logistik biner yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan kelayakan yang baik secara statistik. Berdasarkan hasil uji Likelihood Ratio (LR), diperoleh nilai Chi-square sebesar 29,57 dengan derajat kebebasan (df) = 4 dan p-value sebesar 0,0000. Nilai ini menunjukkan bahwa model secara keseluruhan

signifikan dan mampu membedakan antara individu yang bercerai dan yang tidak bercerai secara statistik. Selain itu, nilai Pseudo R² sebesar 0,0112 mengindikasikan bahwa model mampu menjelaskan sekitar 1,1% variasi dalam keputusan perceraian. Meskipun nilai ini relatif kecil, hal tersebut dapat dimaklumi karena keputusan untuk bercerai merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis, sosial, ekonomi, dan kultural yang tidak seluruhnya dapat tercakup dalam model. Untuk menguji kesesuaian model (goodness-of-fit), digunakan Hosmer-Lemeshow Test, yang menghasilkan nilai $p = 0,1753$. Karena nilai p lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model memiliki kesesuaian yang baik dengan data, sehingga dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut.

Hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa lingkungan sosial berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan individu untuk bercerai. Individu yang tinggal di lingkungan dengan tingkat perceraian tinggi memiliki kemungkinan 1,645 kali lebih besar untuk mengalami perceraian dibandingkan dengan mereka yang tinggal di lingkungan rendah perceraian. Marginal effect dari variabel ini sebesar 2,67%, yang berarti bahwa tinggal di lingkungan tinggi perceraian meningkatkan probabilitas seseorang untuk bercerai sebesar 2,67%. Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa pernikahan dini merupakan faktor yang signifikan dalam meningkatkan kemungkinan terjadinya perceraian. Individu yang menikah pada usia di bawah 19 tahun memiliki kemungkinan bercerai lebih tinggi sebesar 9,8%, dengan nilai marginal effect sebesar 0,50%. Sebaliknya, variabel kontrol lainnya, yaitu jam kerja panjang (lebih dari 40 jam per minggu) dan tingkat pendidikan rendah (setingkat Sekolah Dasar atau lebih rendah), tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan individu untuk bercerai.

Hasil penelitian ini menguatkan pemahaman bahwa lingkungan sosial berperan penting dalam memengaruhi keputusan individu untuk bercerai. Temuan mengenai pengaruh signifikan dari lingkungan dengan tingkat perceraian tinggi mendukung teori social contagion, yang menyatakan bahwa perilaku seperti perceraian dapat menyebar dalam jaringan sosial melalui proses normalisasi dan imitasi. Dalam konteks ini, norma sosial yang permisif terhadap perceraian dapat mengurangi hambatan psikologis dan sosial, sehingga individu lebih terbuka terhadap opsi perceraian sebagai solusi atas konflik rumah tangga.

Temuan bahwa pernikahan dini turut meningkatkan kemungkinan perceraian sejalan dengan penelitian [1] [3]. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa individu yang menikah pada usia muda umumnya belum mencapai kematangan emosional dan ekonomi yang memadai. Usia yang terlalu dini untuk menjalani pernikahan dapat menyebabkan ketidaksiapan dalam menghadapi tantangan rumah tangga, baik secara psikologis maupun praktis.

Kondisi ini berdampak pada lemahnya kemampuan pasangan dalam menyelesaikan konflik serta rendahnya

stabilitas hubungan pernikahan. Ketidaksiapan tersebut membuat pasangan muda lebih rentan terhadap ketegangan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya meningkatkan risiko perceraian. Oleh karena itu, menunda usia pernikahan hingga tercapai kematangan pribadi dan ekonomi dapat menjadi strategi preventif yang penting dalam menekan angka perceraian.

Sementara itu, tidak signifikannya pengaruh pendidikan dan jam kerja terhadap perceraian menunjukkan bahwa faktor struktural ini belum tentu memiliki dampak langsung terhadap keputusan untuk bercerai. Meski secara teoritis pendidikan mampu meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan konflik, dalam konteks tekanan sosial lingkungan, pendidikan belum tentu menjadi pelindung yang cukup kuat. Begitu pula jam kerja, yang meskipun dapat mengurangi waktu bersama pasangan, tampaknya tidak secara langsung memengaruhi keputusan untuk bercerai jika tidak disertai dengan faktor-faktor lain seperti kualitas komunikasi dan dukungan emosional dalam pernikahan.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada karakteristik individu belum cukup dalam menjelaskan fenomena perceraian. Diperlukan kebijakan berbasis komunitas yang mempertimbangkan norma sosial lokal. Misalnya, program edukasi publik yang menekankan pentingnya penyelesaian konflik secara konstruktif dalam pernikahan, serta promosi pernikahan yang dilakukan pada usia matang, dapat menjadi strategi pencegahan yang efektif di daerah-daerah dengan tingkat perceraian tinggi.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dua faktor utama yang secara signifikan memengaruhi keputusan individu untuk bercerai di Provinsi Jawa Barat adalah lingkungan sosial dengan tingkat perceraian yang tinggi dan praktik pernikahan dini. Temuan ini menunjukkan bahwa individu yang tinggal di wilayah dengan banyak kasus perceraian lebih rentan untuk mengadopsi perceraian sebagai solusi atas konflik rumah tangga. Selain itu, usia pernikahan yang terlalu muda turut meningkatkan risiko ketidaksiapan emosional dan ekonomi dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari pemerintah daerah dan lembaga sosial dalam merancang program penguatan ketahanan keluarga, terutama di wilayah dengan angka perceraian tinggi. Upaya ini dapat diwujudkan melalui edukasi publik, konseling pranikah, serta intervensi kebijakan yang mendorong penundaan usia pernikahan demi menciptakan keluarga yang lebih stabil dan harmonis. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah menambahkan variabel kualitas relasi, pengaruh agama, serta status ekonomi untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.

Daftar Rujukan

- [1] Amato, P. R. (2010). Research on Divorce: Continuing Trends and New Developments. *Journal of Marriage and Family*, 72(3),

- 650–666. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2010.00723.x>.
- [2] Andreß, H. J., & Hummelsheim, D. (Eds.). (2009). When Marriage Ends: Economic Consequences for Women and Men in Europe. *Edward Elgar Publishing*. DOI: <https://doi.org/10.4337/9781848447205>.
- [3] Augustine, J. M. (2014). Maternal Education and the Unequal Significance of Family Structure for Children's Early Achievement. *Social Forces*, 93(2), 687–718. DOI: <https://doi.org/10.1093/sf/sou064>.
- [4] Umberson, D., & Montez, J. K. (2010). Social Relationships and Health: A Flashpoint for Health Policy. *Journal of Health and Social Behavior*, 51(1_suppl), S54–S66. DOI: <https://doi.org/10.1177/0022146510383501>.
- [5] Hendajany, N., & Suasih, A. (2020). Benarkah Perempuan Bekerja dan Berpendidikan Mempengaruhi Tingkat Perceraian? *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 13(2), 271–281. DOI: <https://doi.org/10.24843/JEKT.2020.v13.i02.p05>.
- [6] Kamal, B., Karunia, A., Rahmadiane, G. D., & Bersama, P. H. (2024). Dampak Perceraian terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga pada Masa Pandemi Covid 19 di Kota Tegal. Concept: *Journal of Social Humanities and Education*, 3(4), 159–168. DOI: <https://doi.org/10.55606/concept.v3i4.1611>.
- [7] Wira, A., Hulwati, Akmal, H., Adif, R. M., & Na'am, J. (2019). Islamic Economic Orientation Model for Microfinance Institution. *Journal of Social Sciences Research*, 5(3), 676–682. DOI: <https://doi.org/10.32861/jssr.53.676.682>.
- [8] Yuhefizar, Santosa B., Eddy, I. K. P., & Suprapto, Y. K. (2013). Combination of Cluster Method for Segmentation of Web Visitors. *Telkommika*, 11(1), 207-214. DOI: <http://dx.doi.org/10.12928/telkommika.v11i1.906>.
- [9] Na'am, J., Harlan, J., Madenda, S., & Wibowo, E. P. (2016). Identification of the Proximal Caries of Dental X-Ray Image with Multiple Morphology Gradient Method. *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology (IJASEIT)*, 6(3), 343-346. DOI: <http://dx.doi.org/10.18517/ijaseit.6.3.827>.
- [10] Na'am, J. (2017). Edge Detection on Objects of Medical Image with Enhancement Multiple Morphological Gradient (EmMG) Method. *4th Proc. EECISI*. 23-24 Sep. 2017. Yogyakarta: Indonesia. DOI: <http://dx.doi.org/10.1109/EECISI.2017.8239085>.
- [11] Alfaruqy, M. Z., & Indrawati, E. S. (2021). Keputusan Mengakhiri Relasi Suami-Istri: Sebuah Studi Fenomenologis. *Psychopolitan: Jurnal Psikologi*, 5(1), 8–19. DOI: <https://doi.org/10.36341/psi.v5i1.1847>.
- [12] Afif, N. S. (2020). Pengaruh Lingkungan Sosial, Budaya dan Psikologi terhadap Keputusan Pembelian Online di Kota Bogor. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(10), 733–737. DOI: <https://doi.org/10.46799/jst.v1i10.178>.
- [13] Alfa, F. R. (2019). Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1(1), 49. DOI: <https://doi.org/10.33474/jas.v1i1.2740>.
- [14] Sele, R., & Dwikoryanto, M. I. T. (2021). Perceraian dan Dampaknya terhadap Anak. *DUNAMOS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 2(1), 63–76. DOI: <https://doi.org/10.54735/djtpak.v2i1.4>.
- [15] Kesuma, D. A., & Hasyim, R. (2021). Analisis Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat pada Masa Pandemi COVID-19 di Kota Palembang. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 7(1), 13–26. DOI: <https://doi.org/10.51517/jhpt.v7i1.294>.
- [16] Kirana, A. M., & Suprapti, V. (2021). Psychological Well Being Dewasa Awal yang Mengalami Riwayat Perceraian Orang Tua di Masa Remaja. *Buletin Riset Psikologi dan Kesehatan Mental (BRPKM)*, 1(1), 1003–1014. DOI: <https://doi.org/10.20473/brpm.v1i1.27695>.
- [17] Mulanda, D., & Frinaldi, A. (2023). Peningkatan Kasus Perceraian Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Solok. *Tanah Pilih*, 3(1). DOI: <https://doi.org/10.30631/tpj.v3i1.1384>.
- [18] Putra, M. H., Azzura, A., Halimah, H., Siregar, R. U., & Rezky, S. (2023). Penyesuaian Diri Anak Korban Perceraian di Lingkungan Sosial Sekolah. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 5(3), 669–675. DOI: <https://doi.org/10.47467/jdi.v5i3.3561>.
- [19] M. (2018). Penggunaan Tools Assesment Biopsikososial dan Spiritual Anak yang menjadi Korban Perceraian Orang Tua. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 7(1). DOI: <https://doi.org/10.15408/empati.v7i1.10002>.
- [20] Wahyuni, A. P., & Leksono, A. B. (2023). Tinjauan Yuridis Gugat Cerai Istri Akibat Perubahan Status Sosial Tenaga Kerja Wanita (Studi kasus Putusan Nomor: 0217/Pdt.G/2021/PA.Im). *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1), 135. DOI: <https://doi.org/10.33603/publika.v11i1.8211>.